

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini kegiatan dunia usaha tengah bertumbuh. Berbagai pihak sedang berusaha untuk membina para pengusaha terutama pengusaha mikro dan menengah. Seperti yang dilakukan oleh Lusia Efriani, alumnus Universitas Airlangga 2003 yang hari-harinya kini disibukkan dengan pembinaan usaha kecil di wilayah Kepulauan Riau. Pembinaan yang dilakukan Lusie ini termasuk training keterampilan, solusi mencari dana atau modal usaha, menghubungkan antara pengusaha kecil dengan pemodal, membantu mencari pemasaran atau distribusi produk usaha kecil dan pembinaan tertib administrasi (Tribunnews.com, 25 Maret 2010). Selain itu berdasarkan informasi yang diperoleh dari (Pay, 2010), Kamar Dagang dan Industri (kadin) Makassar, Sulawesi Selatan akan menuntun pengusaha lokal untuk berkembang. Pemerintah pun turut berperan dalam mengembangkan pengusaha, seperti Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mencanangkan 2010 – 2013 sebagai tahun percepatan program satu juta pengusaha baru di sektor mikro dan menengah, yang akan dikoordinir Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Tempointeraktif.com, 18 November 2009).

Dalam pengembangan usaha mikro dan menengah ini, diharapkan seluruh pihak dapat turut berperan untuk mengembangkan pengusaha di sektor mikro dan menengah. Pemerintah daerah perlu menerapkan suatu imbauan atau kalau memungkinkan untuk mewajibkan aturan kepada setiap perusahaan yang beroperasi,

berkantor pusat, kantor cabang di kota/ kabupaten di Jabar, untuk terlibat membina satu desa. Sumber dana bagi perusahaan yang akan membina desa, bisa dimungkinkan dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Aripin, 2010).

Salah satu perusahaan yang terikat dengan tanggung jawab *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero). Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kereta Api Indonesia (Persero) terikat dengan tanggung jawab *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam hal pembinaan kepada Usahawan Kecil dan Menengah melalui Program Bina Kemitraan, dan pada tahun 2009 dana pembinaan yang telah terealisasi sebesar Rp 1.524.030.000 (*Indonesian Railways Company Profile*, 2009).

PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai penyedia jasa angkutan perkeretaapian, selain berperan dalam pembinaan kepada Usahawan Kecil dan Menengah, Kereta Api juga turut berperan dalam pertumbuhan ekonomi wilayah dan perekonomian nasional (Dikun, 2010). Alasannya adalah karena ekonomi Indonesia diproyeksikan akan tumbuh secara bertahap dan konsisten dari sekitar 5,5 persen di tahun 2010 menjadi sekitar 7-8 persen atau lebih di tahun 2014. Dalam jangka panjang, Indonesia diproyeksikan akan menjadi negara ekonomi maju dan mandiri di tahun 2025 (Dikun, 2010). Oleh karena itu, pada tahun 2025-2030 jaringan dan sistem pelayanan transportasi sudah harus terbangun dan secara efisien dan efektif berfungsi penuh mendukung pergerakan ekonomi nasional. Dengan melihat proyeksi ekonomi 15 tahun ke depan, maka pergerakan dan mobilitas perekonomian Indonesia tidak dapat lagi dibebankan sepenuhnya kepada jaringan jalan, karena kenyataan yang ada pada saat ini, jaringan jalan yang macet dan rusak telah menyebabkan terjadinya biaya ekonomi yang sangat tinggi, menghambat kelancaran arus barang

untuk ekspor, menurunkan daya saing ekonomi, dan menjadi penghalang bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Oleh karena itu Indonesia harus membangun infrastruktur, industri, dan jasa perkeretaapian nasionalnya ke tahapan dimana jaringan kereta api menjadi alternatif yang sangat rasional dan efisien dan dapat bersaing secara sehat dengan jaringan jalan dalam memikul beban pergerakan ekonomi nasional ke depan. Apalagi dipandang dari berbagai sisi, dengan mengutamakan angkutan berbasis rel akan lebih baik karena dari sisi energi dan lingkungan terjadi efisiensi 20 hingga 50 persen (Dni, 2010).

Melihat pentingnya peran perkeretaapian bagi perekonomian nasional, dan bahkan Undang Undang Perkeretaapian Nomor 23 Tahun 2007 pun mengharuskan pemerintah untuk menempatkan Kereta Api sebagai tulang punggung angkutan masal penumpang dan barang dalam menunjang tumbuhnya perekonomian nasional (Dikun, 2010), maka bisnis perkeretaapian itu sendiri pun menjadi meningkat. Bahkan kini peluang bisnis rel perkotaan di kawasan Asia Pasifik masih menjanjikan karena sejumlah negara masih mengandalkan kebutuhan transportasi cepat dan masal. Menurut Eugene van de Weerd, Direktur Frost & Sullivan Indonesia, “Proyek ini ditujukan mencapai sistem transportasi umum yang lancar, menghubungkan berbagai daerah pinggiran dan area bisnis di perkotaan” (Dni, 2010). Selain itu, peningkatan peran Kereta Api dalam perekonomian juga dapat dilakukan dengan membangun interaksi jaringan Kereta Api dengan kawasan industri, sentra pertanian, wilayah pertambangan, dan kawasan ekonomi khusus lainnya (Dikun, 2010).

Dengan adanya tuntutan terhadap peran perkeretaapian bagi perekonomian nasional ini serta dengan adanya peningkatan bisnis perkeretaapian, tentunya membuat manajemen Kereta Api akan selalu berupaya untuk meningkatkan

kinerjanya di setiap lini operasi perusahaan agar dapat memenuhi tuntutan peran tersebut. Tetapi dengan banyaknya lini operasi di dalam perusahaan, membuat manajemen tidak mungkin dapat mengawasi secara penuh kinerja setiap lini operasi, ada kemungkinan salah satu dari lini tersebut akan sedikit terabaikan. Oleh karena itu diperlukan pengendalian internal yang baik yang dirancang sedemikian rupa oleh manajemen untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya kecurangan (*fraud*). Karena dengan lemahnya pengendalian internal di dalam suatu perusahaan, maka hal itu dapat memicu terjadinya kecurangan (*fraud*) yang akan berdampak pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kecurangan (*fraud*) mencakup perbuatan melanggar hukum dan pelanggaran terhadap peraturan dan perundangan lainnya yang dilakukan dengan niat untuk berbuat curang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja demi keuntungan atau kerugian suatu organisasi oleh orang dalam atau juga oleh orang diluar organisasi tersebut (Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004). Kecurangan (*fraud*) yang terjadi dapat berupa pencurian, penggelapan, penyelewengan, dan lain-lain.

Perusahaan memerlukan seorang auditor internal dalam mencapai pengendalian internal yang baik, karena auditor internal berfungsi untuk menjalankan audit internal, dimana audit internal merupakan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Setiap kejadian yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan akan dapat terdeteksi oleh auditor, termasuk kecurangan (*fraud*) yang terjadi dan kemudian auditor internal akan memberikan saran untuk perbaikan kinerja perusahaan yang bersangkutan. Standar Profesi Audit Internal sendiri telah mengemukakan standar yang terkait dengan identifikasi kecurangan (*fraud*) yang dinyatakan dalam standar 1210.2 (pengetahuan mengenai

kecurangan) yaitu, audit internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti, dan menguji adanya indikasi kecurangan (Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004). Selain itu *practice advisory* 1210.a2-1, “*identification of fraud*” (identifikasi kecurangan), menyarankan agar:

“Auditor internal bertanggung jawab untuk membantu pencegahan kecurangan melalui pemeriksaan dan pengevaluasian kecukupan dan efektivitas sistem kontrol internal, setara dengan tingkat potensi eksposur/risiko di berbagai segmen operasi organisasi.” (Sawyer *et al*, 2006).

Sebelum melakukan penelitian ini lebih lanjut, penulis telah menentukan variabel terlebih dahulu. Variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai (Kuncoro, 2003). Penulis menentukan dua variabel yaitu audit internal sebagai variabel X (variabel independen) dan pencegahan kecurangan (*fraud*) sebagai variabel Y (variabel dependen). Menurut (Sawyer *et al*, 2006), audit internal memiliki peranan yang penting dalam semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dan risiko-risiko terkait dalam menjalankan usaha. Penelitian mengenai peranan audit internal dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) telah dilakukan terlebih dahulu oleh:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alwin Fauzan pada tahun 2003 dengan objek penelitian audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal persediaan barang jadi pada PT PINDAD (Persero), Bandung. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa audit internal berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal persediaan barang jadi.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Tulus Pahala Simatupang pada tahun 2005 dengan objek penelitian audit internal sebagai alat bantu manajemen

dalam meningkatkan manajemen mutu perusahaan pada PT Telkom Indonesia Tbk. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa audit internal berperan dalam menunjang implementasi manajemen mutu.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Ihsan Kusumah pada tahun 2008 dengan judul “Peranan Audit Internal dalam Pencegahan Kecurangan (*fraud*) (studi kasus pada PT Bank Jabar Banten Cabang Utama, Bandung)”. Objek penelitian tersebut adalah audit internal dan pencegahan *fraud* pada Kantor PT Bank Jabar Banten Cabang Utama, Bandung. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa audit internal memiliki peran yang signifikan di dalam pencegahan kecurangan (*fraud*).

Melihat bahwa audit internal memiliki peran yang penting di dalam kinerja perusahaan, baik itu perbankan maupun industri, serta untuk menguji apakah audit internal juga berperan dalam kinerja perusahaan jasa lainnya terutama jasa transportasi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dalam hal peranan audit internal dalam upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis bermaksud untuk menyusun sebuah skripsi dengan judul:

“Peranan Audit Internal dalam Pencegahan Kecurangan (*fraud*) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah fungsi audit internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah dilaksanakan secara memadai?
2. Apakah fungsi audit internal berperan dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui apakah fungsi audit internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah dilaksanakan secara memadai.
2. Untuk mengetahui apakah fungsi audit internal berperan dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Penulis

Untuk memperdalam pemahaman dalam bidang audit internal, serta dapat menerapkan teori yang telah dipelajari ke dalam kehidupan keseharian.

2. Akademisi

Untuk memberikan pemikiran baru dan informasi dalam menambah pengetahuan dalam bidang audit internal.

3. Perusahaan

Untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi yang bermanfaat dalam pengembangan perusahaan.

4. Penelitian Selanjutnya

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya terutama dalam bidang audit internal.